



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JANRY HAPOSAN U. P. SIMANUNGKALIT
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 465660

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.370.094.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/146 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.620.094.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 97.850.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT BEBEK Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MPV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MPV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. LAINNYA, CYBER SEPEDA STATIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
5. LAINNYA, SAMSUNG TV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 28.836.025



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.496.780.025
III. HUTANG	Rp.	1.554.378.250
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.942.401.775

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.